

JURNAL HUKUM

IUS QUIA IUSTUM



PENANGGUNGJAWAB

Budi Agus Riswandi

PENGARAH

Mahrus Ali

KETUA DEWAN PENYUNTING

Ayu Izza Elvany

ANGGOTA DEWAN PENYUNTING

Ni'matul Huda

Idul Rishan

Ayu Atika Dewi

Ari Wibowo

Ahmad Sadzali

Sahid Hadi

ANGGOTA PENYUNTING

Laiza Aprilia Almira

Fatma Reza Zubarita

Yustika Ardhany

TATA USAHA & IT

Jeffri Ardiansyah

KEUANGAN

Solikh Agustin

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA

Jln. Kaliurang Km. 14,5 Yogyakarta

Po. Box 1133 Telp. 379178 - 377043

penerbitan.fh@uii.ac.id

ISSN Print : 0854-8498

ISSN Online : 2527-502

No. Akreditasi: 158 /E/KPT/2021

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DARI REDAKSI	ii
♦ Optimalisasi Fungsi ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) dan Tantangan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Asia Tenggara Sigit Riyanto	247-269
♦ Tinjauan Maqashid Syariah Kontemporer terhadap Keadaan tanpa Kewarganegaraan Muhammad Habibi Miftakhul Marwa	270-292
♦ Tujuan Kemanfaatan Hukum Merancang Pedoman Sanksi Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Yulia K., Rusli M. dan Aroma Elmina M	293-311
♦ Independensi Otoritas Jasa Keuangan (Pasca Diundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Jasa Keuangan) Upita Anggunsuri dan Zahara	312-336
♦ Meaningful Participation as People's Sovereignty Form in Democratic Rule of Law State Fahmi RF., Ratih LC. dan Christo STS.	337-357
♦ Kekuatan Mengikat Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Nomor 20/PUU-XIX/2021) Gunawan A. Tauda	358-383
♦ Kepastian Hukum vs Ketidakpastian Kerja: Substansi Ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Nabiyala Risfa Izzati	384-407
♦ Perkembangan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Menangani Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Ning Ayunda Chofifi dan Eny Kusdarin	408-433
♦ Anomali Perlindungan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Mahkamah Agung Despan Heryansyah dan Sahid Hadi	434-460
♦ Konsep Pencegahan Cyberbullying Berbasis Techno Prevention Pada Era Society 5.0 di Indonesia Khofidhotur Rovida dan Sasmini	461-485
Biodata Penulis	486-487
Petunjuk Penulisan	488-488
Ucapan Terima Kasih	489-489

JURNAL HUKUM Caturwulan ini diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia sebagai media komunikasi dan pengembangan ilmu. Jurnal terbit setiap bulan Januari, Mei, September. Redaksi menerima naskah artikel laporan penelitian. Naskah yang dikirim minimal 20 halaman maksimal 25 halaman diketik spasi ganda dan disertai biodata. Redaksi berhak mengubah naskah sepanjang tidak mengubah substansi isinya.

Dari Redaksi

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Isu hukum kian berkembang seiring dengan kegiatan manusia yang sangat dinamis. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM memasuki edisi kedua tahun 2024 dengan sajian artikel yang aktual dan kontekstual. Pada Volume 31 Nomor 2 Mei 2024 ini diawali dengan kajian dari Sigit Riyanto yang membahas mengenai “Optimalisasi Fungsi ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) dan Tantangan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Asia Tenggara”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi fungsi AICHR dalam upaya perlindungan HAM akan memberikan kontribusi signifikan bagi pemajuan dan perlindungan HAM, serta penguatan ASEAN sebagai organisasi regional yang kredibel. Bergeser ke bahasan selanjutnya, mengenai “Tinjauan Maqashid Syariah Kontemporer terhadap Keadaan tanpa Kewarganegaraan”, Muhammad Habibi Miftakhul Marwa membahas mengenai keadaan tanpa kewarganegaraan yang menjadi permasalahan global. Hal ini menghambat seseorang dalam mendapatkan dan mengembangkan hak dasar manusia, sehingga lebih banyak mendatangkan mudarat dibandingkan maslahat. Selain itu, ada Yulia Kurniaty, Rusli Muhammad, dan Aroma Elmina Martha yang mengangkat isu “Tujuan Kemanfaatan Hukum Merancang Pedoman Sanksi Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi”. Mereka mengkaji kemanfaatan hukum perlunya merancang pedoman sanksi kekerasan seksual di Perguruan Tinggi agar terwujud jaminan penegakkan hukum bagi setiap orang yang melanggar aturan utamanya melakukan kekerasan seksual.

Selanjutnya, penelitian dari Upita Anggunsuri dan Zahara dengan judul “Independensi Otoritas Jasa Keuangan (Pasca Diundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Jasa Keuangan)” yang menyimpulkan bahwa terdapat tantangan dalam menjaga independensi OJK pasca diterbitkannya undang-undang tersebut. Beralih ke isu mengenai *meaningful participation*, kali ini penelitian dengan judul “*Meaningful Participation as People's Sovereignty Form in Democratic Rule of Law State*” yang dilakukan oleh Fahmi Ramadhan Firdaus, Ratih Listyana Chandra, dan Christo Sumurung Tua Sagala menguraikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang dinilai sebagai keputusan penting dalam memperkuat kedaulatan rakyat dengan mendorong partisipasi yang bermakna dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, Gunawan A. Tauda juga mengangkat isu mengenai “Kekuatan Mengikat Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konsitusi dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Nomor 20/PUU-XIX/2021)”. Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan implementasi Putusan Nomor 20/PUU-XIX/2021, pertimbangan hukum (*legal reasoning*), baik yang bersifat *ratio decidendi* maupun *obiter dicta*, memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama sebagaimana amar putusan.

Selain beberapa kajian di atas, terdapat beberapa kajian atau pembahasan menarik lainnya. Serikat buruh dan gerakan masyarakat sipil dengan tegas menolak adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang menyebabkan ketidakpastian kerja, utamanya dalam isu mengenai perjanjian kerja waktu tertentu dan alih daya. Tulisan berjudul “Kepastian Hukum vs Ketidakpastian Kerja: Substansi Ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja” oleh Nabiyla Risfa Izzati ini menyimpulkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja memberikan ketidakpastian hukum bagi tenaga kerja. Artikel lain yang tak kalah menarik terkait perkembangan putusan MK dalam penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden yang ditulis oleh Ning Ayunda Choffi dan Eny Kusdarini ini menggambarkan bahwa adanya dissenting opinion yang disajikan oleh hakim MK menjadi bukti masih adanya suara-suara kritis yang berkomitmen pada prinsip keadilan dan demokrasi.

Dua artikel lain yang perlu untuk dibaca oleh penikmat pembaca Jurnal Ius yakni Anomali perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan di Mahkamah Agung oleh Despam Heryansyah dan Sahid Hadi, dengan penelitiannya yang mengidentifikasi sejumlah persoalan struktural, substansial, dan teknis dalam implementasi judicial review di Mahkamah Agung. Artikel terakhir terkait salah satu dampak perkembangan teknologi yang pesat yakni kasus *cyberbullying*, Khofidhotur Rovidia dan Sasmini menjelaskan bahwa penggunaan hukum pidana semata dalam penindakan *cyberbullying* tidak efektif dan perlu untuk memanfaatkan *Artificial Intelligence (AI)*.

Akhir kata, kami berharap agar edisi kedua di tahun 2024 ini dapat memberikan wawasan dan manfaat yang luas di masa mendatang. Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para penulis artikel yang telah menyelesaikan proses penyuntingan dengan baik, serta kepada Mitra Bestari yang telah dengan cermat dan amat baik menelaah dan memberikan catatan untuk penerbitan edisi ini.

Selamat membaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Redaksi